



PENDATAAN DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG

Mutiara Zafira S¹, Raihana Indah²

¹ UIN Salatiga dan Indonesia, ² Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN Salatiga, dan Indonesia, ³ Psikologi Islam, Fakultas Dakwah, UIN Salatiga, dan Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: mutiarazafira27@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan	Bertujuan untuk pendataan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas sebagai langkah awal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
Metodologi	Penelitian kualitatif dengan desain studi lapangan sensus melibatkan kunjungan langsung, wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan fasilitasi komunikasi antara penyandang disabilitas, pemerintah desa, dan LSM. Waktu yang dibutuhkan selama satu bulan.
Hasil	Pendataan 205 responden menunjukkan 46,83 % fisik, 22,93 % mental, 17,07 % sensorik, dan 6,34 % intelektual; kebutuhan utama meliputi alat mobilitas (kursi roda, modifikasi rumah) di Mukiran, Jetis, dan Kaliwungu; layanan psikososial di Kaliwungu; serta alat bantu dengar dan bahan ajar adaptif untuk kelompok sensorik dan intelektual; mayoritas belum mengakses pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan formal, dan terhambat administrasi KTP/KK.
Keterbatasan Penelitian	Durasi pengamatan satu bulan, sampel satu kecamatan, dan pendekatan kualitatif menyebabkan keterbatasan dalam menilai dampak jangka panjang dan potensi bias subjektif.
Kata kunci	<i>Pendataan, Pendampingan, Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan Ekonomi</i>

ABSTRACT

Purpose	To map and provide support for all 205 persons with disabilities in Kecamatan Kaliwungu as an initial step toward inclusive economic empowerment.
Methodology	A qualitative census field study employing direct home visits, structured interviews, participatory observation, and facilitated communication among persons with disabilities, village government, and local NGOs over one month.



result	Data from 205 respondents show 47 % physical, 23 % mental, 17 % sensory, and 6 % intellectual disabilities; primary needs include mobility aids (wheelchairs, home modifications) in Mukiran, Jetis, and Kaliwungu; psychosocial services in Kaliwungu; and hearing aids plus adaptive learning materials for sensory and intellectual groups; most lack access to employment, adequate health services, formal education, and face barriers due to missing ID cards.
Research Limitations	A one-month observation in a single district and a qualitative approach limit the assessment of long-term impact and may introduce subjective bias.
Key words	<i>Data Collection, Accompaniment, Persons With Disabilities, Economic Empowerment</i>

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah bagian integral dari masyarakat yang diakui memiliki hak setara dalam menikmati kesempatan sosial dan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik, prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 7,29 % dari total penduduk pada 2020, namun kurang dari 50 % telah terakses program perlindungan sosial pemerintah. (Badan Pusat Statistik, 2020) Kondisi ini sejalan dengan temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa hambatan struktural meliputi fisik, sikap masyarakat, hingga kebijakan masih menjadi penghalang utama partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif dengan merujuk pada komitmen negara dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. (Republik Indonesia, 2011)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketimpangan akses ekonomi dan sosial, meskipun memiliki hak dan potensi sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hambatan infrastruktur, pendidikan, keterampilan, dan stigma sosial menghalangi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi mandiri dan produktif, sehingga menuntut perhatian khusus dalam kerangka pembangunan inklusif.

Di Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Kaliwungu, keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpetakan secara sistematis. Ketiadaan data yang akurat dan terperinci menjadi hambatan awal dalam merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran. Selain itu, program pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat disabilitas masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi produktif dan terbatasnya peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup.

Pendekatan studi lapangan sensus untuk seluruh 205 penyandang disabilitas di Kaliwungu menjadi langkah inovatif, mengisi celah literatur sekaligus memberikan gambaran fenomenologis kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan dasar mereka. Keunikan sampel sensus penuh tanpa pembatasan jumlah responden menjadikan penelitian ini kaya kontribusi empiris dan teoritis.

Rangkaian pendampingan yang mengintegrasikan kunjungan rumah, asesmen kebutuhan, dan fasilitasi komunikasi antar pihak terkait menciptakan proses partisipatif yang jarang ditemui pada kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya



menghasilkan angka-angka, melainkan juga rekomendasi program berbasis hak dan kebutuhan riil.

Tantangan pemberdayaan penyandang disabilitas bersifat ganda, yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup aksesibilitas fisik, kualitas layanan kesehatan, serta peluang pendidikan dan pelatihan. Sementara aspek internal meliputi kepercayaan diri (Dewi, 2015), kemampuan menyesuaikan diri (Mulyadi, 2020), rendahnya kapasitas akibat minimnya akses pendidikan (Purinami, Apsari, & Mulyana, 2018), keterbatasan informasi (Utami, 2015), dan kurangnya kesempatan dalam TIK yang memengaruhi akses dunia kerja. Kondisi ini mengakibatkan partisipasi mereka di pasar kerja masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki. (Dhea Erisa & Dini Widinarsih, 2022)

Pendataan yang akurat dan terstruktur merupakan fondasi utama dalam proses perencanaan intervensi sosial. Dengan mengetahui jumlah, jenis disabilitas, latar belakang pendidikan, potensi ekonomi, serta hambatan yang dihadapi, maka program pemberdayaan dapat disusun secara lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, proses pendampingan menjadi elemen kunci dalam mendorong penyandang disabilitas agar mampu mengembangkan potensi diri, mengakses pelatihan, modal usaha, serta membangun jejaring ekonomi secara inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendataan dan pendampingan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Kaliwungu, serta menganalisis sejauh mana intervensi tersebut mampu mendukung pemberdayaan ekonomi mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Berdasarkan fenomena ketiadaan data akurat dan terbatasnya program pendampingan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kaliwungu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pendataan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang” yang bertujuan memetakan kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan dasar penyandang disabilitas serta mendukung pemerintah desa dan LSM dalam merancang intervensi pemberdayaan yang inklusif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan sensus yang melibatkan seluruh 205 penyandang disabilitas di Kecamatan Kaliwungu yang bertujuan memahami fenomena sosial dalam konteks alami melalui deskripsi mendalam dan analisis induktif. (Sugiono, 2017) Desain studi lapangan (field study) dipilih agar peneliti dapat terjun langsung ke lokasi, berinteraksi intensif dengan informan, serta mengamati dinamika kehidupan penyandang disabilitas secara holistik. Karena populasi hanya 205 orang, desain sensus diterapkan sehingga seluruh populasi menjadi sampel, menjamin data yang komprehensif dan representatif untuk perencanaan intervensi.

Prosedur pengumpulan data meliputi tahapan: perencanaan (penyusunan pedoman wawancara dan lembar observasi), uji coba instrumen, pelatihan tim lapangan, lalu pelaksanaan kunjungan rumah meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi serta

fasilitasi diskusi kelompok dengan pemerintah desa dan LSM. (Ahmad Putra & Dewi Rahmawati, 2020)

Pendataan dan pendampingan penyandang disabilitas dilaksanakan oleh 2 mahasiswa KKN UIN Salatiga di Kecamatan Kaliwungu, dimana bekerja sama dengan petugas TKSK dan pemerintahan desa setempat. Metode pelaksanaan pendataan dan pendampingan yang dilakukan adalah mewawancarai penyandang disabilitas secara langsung didampingi oleh kepala dusun setempat. Berikut tahapan yang dilakukan:

Tahap Persiapan (Hari 1–3):

Hari pertama dilaksanakan Pelatihan intensif tim KKN mencakup etika pendampingan inklusif, teknik wawancara mendalam, penggunaan kuesioner digital (Google Forms offline), simulasi pengisian, dan prosedur backup data di lapangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Hari ketiga melakukan kunjungan koordinasi dan sosialisasi ke kantor Camat untuk memperoleh izin operasional dan dukungan teknis, dilanjutkan pertemuan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa, dan Kepala Dusun di 11 desa untuk memperkenalkan tujuan penelitian, mekanisme pendataan, dan peran verifikasi data.

Tahap Pendataan (Hari 4–14):

Selama 11 hari berikutnya, tim melakukan kunjungan door-to-door ke semua 11 desa di Kecamatan Kaliwungu untuk mendata 205 penyandang disabilitas. Setiap rumah tangga diakses dengan pendekatan persuasif, mengutamakan komunikasi yang empatik dan menghormati privasi. Formulir digital dioperasikan secara offline, kemudian disinkronkan ke server pusat setiap malam untuk meminimalkan risiko kehilangan data. Tim juga secara persuasif untuk wawancara mendalam, menggali narasi pengalaman sehari-hari, hambatan akses, dan aspirasi ekonomi mereka, sehingga melengkapi data kuantitatif dengan wawasan kualitatif.

Tahap Verifikasi (Hari 15–17):

Setelah pendataan selesai, tim melakukan verifikasi data bersama TKSK dan petugas dinas sosial. Proses ini mencakup pengecekan ulang formulir memastikan jumlah dan jenis disabilitas tercatat konsisten serta klarifikasi jika ada data ganda atau kontradiktif. Dokumentasi foto kartu identitas dan Kartu Keluarga dibandingkan kembali dengan data lapangan. Pertemuan verifikasi ini juga membuka ruang diskusi cepat untuk menyesuaikan pedoman pendampingan awal berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.

Tahap Pelaporan Awal (Hari 18–20):

Pada tahap akhir, tim menyusun laporan sementara yang memuat ringkasan karakteristik responden, sebaran jenis disabilitas, dan kebutuhan prioritas menurut desa. Draft laporan ini dikaji internal oleh peneliti dan TKSK untuk merumuskan rekomendasi awal intervensi.

HASIL

Kecamatan Kaliwungu mempunyai luas wilayah menurut data dari BPS Kabupaten Semarang seluas 6.579,55 Ha atau 6,92 dari luas Kabupaten Semarang yang secara administratif di batasi oleh beberapa wilayah yaitu Batas sebelah Barat Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, Batas sebelah Timur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, Batas sebelah Utara Kecamatan Susukan Batas sebelah Selatan Kabupaten Boyolali.



Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mencerminkan dinamika kependudukan pedesaan dengan karakter geografis khas lereng pegunungan. Terletak pada ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut dan mencakup luas wilayah $\pm 29,95$ km², Kaliwungu menjadi titik strategis bagi kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Jumlah penduduk mencapai sekitar 26.660 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 890 jiwa/km². Populasi ini tersebar di 11 desa, termasuk desa Kaliwungu, Jetis, dan Rogomulyo, yang menunjukkan struktur komunitas yang majemuk namun solid. Aktivitas pertanian masih mendominasi penggunaan lahan, di mana sekitar 2.493 hektar digunakan untuk pertanian sawah dan 636 hektar untuk lahan kering, sedangkan sisanya dialokasikan untuk pemukiman dan fasilitas umum.

Sistem pemerintahan di tingkat kecamatan telah tertata melalui beberapa seksi, seperti pemerintahan umum, pembangunan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mendukung kelancaran pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam aspek sosial, Kaliwungu didukung oleh infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Dakwah UIN Salatiga di Kecamatan Kaliwungu memberikan kontribusi nyata dalam pendataan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Program ini berhasil mengidentifikasi sebaran jenis disabilitas di 10 desa, meliputi kategori disabilitas fisik, sensorik, intelektual&mental. Dengan pendekatan partisipatif, pendataan dilaksanakan melalui interaksi langsung antara mahasiswa, keluarga penyandang disabilitas, aparat desa, dan tokoh masyarakat setempat, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan kontekstual.

Selain pendataan, kegiatan juga mencakup pendampingan psikososial dan edukasi bagi keluarga penyandang disabilitas. Aktivitas berupa penyuluhan tentang hak-hak dasar, akses terhadap layanan sosial, dan strategi pemberdayaan komunitas disampaikan secara langsung oleh mahasiswa yang telah dibekali pelatihan teknis dari Dinas Sosial dan PPDI Kabupaten Semarang. Pelatihan ini memastikan bahwa proses pendampingan dilakukan secara etis dan dengan pendekatan humanis.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Banyak keluarga menyampaikan bahwa mereka belum pernah terdata secara resmi dan merasa terbantu dengan adanya kunjungan serta layanan informasi yang diberikan. Program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, empati sosial, dan membangun jejaring lokal pemberdayaan. Bagi mahasiswa, keterlibatan langsung dengan komunitas juga memperkuat kompetensi sosial dan penguatan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Pendataan Dengan Penyandang Disabilitas Tuna Ganda (Rungu&Wicara)

Tabel 1. Hasil Pendataan Berdasarkan Desa Yang Memiliki KK & KTP

Desa	Jumlah Responden	Keterangan
Jetis	26	
Siwal	21	
Pager	6	
Mukiran	31	
Payungan	19	
Kaliwungu	56	
Kradenan	20	
Papringan	10	Belum terdata
Rogomulyo	18	
Udanwuh	5	
Kener	3	
total	205	Tanpa papringan

Hasil pendataan penyandang disabilitas di Kecamatan Kaliwungu menunjukkan sebaran jumlah responden yang cukup bervariasi di 11 desa, mencerminkan tantangan dan potensi yang berbeda dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Dari total 205 individu yang telah terdata, Desa Kaliwungu mencatat jumlah tertinggi dengan 56 penyandang disabilitas, diikuti oleh Mukiran (31) dan Jetis (26). Konsentrasi yang tinggi ini menunjukkan urgensi intervensi ekonomi berbasis lokal, terutama pelatihan keterampilan kerja dan penyediaan akses permodalan mikro.

Desa-desanya seperti Siwal (21), Kradenan (20), dan Payungan (19) juga memiliki jumlah responden yang signifikan dan dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan unit usaha sosial berbasis komunitas, seperti kelompok usaha bersama atau koperasi inklusif. Sementara desa dengan jumlah terendah seperti Kener (3), Udanwuh (5), dan Pager (6) tetap menjadi bagian penting dalam skema pemberdayaan yang merata, agar tidak terjadi eksklusi geografis atau ketimpangan distribusi program.

Papringan melaporkan 10 penyandang disabilitas, namun masih dalam proses verifikasi data. Ketidakeengkapan ini mencerminkan adanya hambatan administratif seperti belum terdaftar dalam dokumen resmi (KTP/KK), yang secara langsung memengaruhi akses mereka

terhadap bantuan ekonomi dan fasilitas layanan sosial lainnya. Untuk itu, pendampingan administratif sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam membuka peluang ekonomi mereka.

Secara keseluruhan, distribusi geografis penyandang disabilitas menjadi fondasi penting dalam merancang model pemberdayaan ekonomi yang adaptif. Pendekatan berbasis desa memungkinkan penyusunan program yang sesuai dengan kapasitas lokal, termasuk identifikasi potensi usaha rumahan, penguatan jejaring pasar, dan pelatihan literasi keuangan. Dengan strategi yang kontekstual, pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan secara inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian komunitas penyandang disabilitas di Kaliwungu.



Gambar 2. Pendataan Dan Pendampingan Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Tabel 2. Kondisi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kaliwungu

Jenis Disabilitas	Estimasi Jumlah	Persentase
Fisik (lumpuh, amputasi)	96	46.83%
Sensorik (rungu, netra)	35	17.07%
Mental	47	22.93%
Intelektual	13	6.34%
Total	205	100%

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan terhadap 205 penyandang disabilitas di Kecamatan Kaliwungu, diperoleh gambaran komposisi jenis disabilitas yang beragam. Disabilitas fisik mendominasi dengan jumlah 96 orang atau sebesar 46,83%, mencakup kondisi seperti kelumpuhan, amputasi, dan keterbatasan gerak lainnya. Kelompok ini menunjukkan kebutuhan paling tinggi terhadap alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kruk, serta modifikasi bangunan hunian yang ramah disabilitas.

Disabilitas mental menempati urutan kedua dengan jumlah 47 responden (22,93%), diikuti oleh disabilitas sensorik (rungu dan netra) sebanyak 35 orang (17,07%). Kedua kelompok ini menghadapi tantangan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan akses informasi,

sehingga program pendampingan psikososial dan penyediaan teknologi bantu seperti alat dengar dan materi ajar adaptif menjadi prioritas yang mendesak.

Sementara itu, penyandang disabilitas intelektual sebanyak 13 orang (6,34%) menunjukkan kebutuhan khusus dalam pengembangan literasi dasar, dukungan keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan jenis disabilitas lainnya, kelompok ini tetap menjadi sasaran penting dalam penyusunan program inklusif berbasis komunitas.

Proporsi jenis disabilitas ini memperkuat urgensi pendekatan yang bersifat fleksibel dan multi-lapis dalam pemberdayaan ekonomi. Intervensi perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing kategori disabilitas, agar potensi mereka dapat dikembangkan secara optimal dalam lingkungan sosial yang mendukung dan produktif. Data ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan kebijakan, distribusi bantuan, dan penyusunan model pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kaliwungu.



Gambar 3. Penyandang Disabilitas Mental Yang Dirawat Oleh Warga Setempat

Selain sebaran berdasarkan jenis disabilitas dan distribusi geografis, penelitian ini juga mengungkap sejumlah temuan kualitatif yang memperkuat urgensi intervensi berbasis pemberdayaan ekonomi. Hasil wawancara mendalam dengan beberapa keluarga responden menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas belum pernah terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik formal maupun informal. Sebagian dari mereka memiliki keterampilan sederhana seperti membuat kerajinan tangan, menjahit, atau beternak namun belum ada dukungan sistematis untuk mengembangkan keterampilan tersebut menjadi usaha berkelanjutan.

Rendahnya akses terhadap pelatihan kerja, modal usaha, dan informasi pasar menjadi kendala utama yang diidentifikasi dalam temuan lapangan. Bahkan di desa-desa dengan jumlah responden tinggi seperti Mukiran dan Kaliwungu, tidak terdapat program ekonomi inklusif yang berkelanjutan atau unit usaha berbasis komunitas yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung. Hal ini mengindikasikan belum terintegrasinya isu disabilitas dalam perencanaan ekonomi desa.

Di sisi lain, aspek administratif juga memengaruhi peluang partisipasi ekonomi. Beberapa responden, khususnya di Papringan dan Jetis, belum memiliki dokumen identitas seperti KTP atau KK yang valid. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak bisa mengakses bantuan sosial, program kewirausahaan pemerintah, ataupun layanan keuangan formal. Pendampingan administratif melalui gerai keliling dan fasilitasi perekaman data dinilai menjadi langkah strategis yang sangat dibutuhkan.

Temuan lain adalah tingginya ketergantungan pada keluarga inti. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan ekonomi secara mandiri karena keputusan sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua atau wali. Rendahnya tingkat literasi digital dan kepercayaan diri juga muncul sebagai hambatan internal yang menghambat proses pemberdayaan. Oleh karena itu, program intervensi perlu menggabungkan aspek pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas mental dan sosial, serta pendampingan akses layanan agar penyandang disabilitas memiliki kontrol atas kehidupan dan aktivitas ekonominya.

Secara keseluruhan, hasil lapangan menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari penyediaan layanan dasar, reformasi administratif, dan pembangunan kapasitas berbasis komunitas. Model partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini memberikan kerangka awal untuk membangun sistem ekonomi inklusif yang sesuai dengan realitas lokal di Kecamatan Kaliwungu.



Gambar 4. Penyandang Disabilitas Intelektual

Hasil pendataan penyandang disabilitas oleh mahasiswa KKN UIN Salatiga

1. Profil dan Sebaran Jenis Disabilitas

Kegiatan pendataan menghasilkan informasi rinci mengenai 205 penyandang disabilitas yang tersebar di 11 desa. Jenis disabilitas paling dominan adalah fisik (46,83%), disusul disabilitas mental (22,93%), sensorik (17,07%), dan intelektual (6,34%). Sebaran ini memberikan fondasi untuk penyusunan program berbasis kebutuhan spesifik seperti kursi roda, alat bantu dengar, serta modul edukatif adaptif. Selain mengidentifikasi jenis disabilitas, pendataan juga mengungkap kesenjangan layanan dasar yang dihadapi responden, seperti kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.



2. Kebutuhan Dasar dan Hambatan Pemberdayaan Ekonomi

Hasil asesmen menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas belum terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Faktor penghambat mencakup keterbatasan keterampilan, minimnya akses pelatihan kerja, tidak tersedianya modal usaha, serta rendahnya literasi digital dan kepercayaan diri. Beberapa responden bahkan belum memiliki dokumen identitas yang sah, sehingga tidak bisa mengakses bantuan pemerintah maupun layanan perbankan. Ini menegaskan pentingnya integrasi program kewirausahaan inklusif dan pendampingan administratif untuk membuka peluang pemberdayaan ekonomi yang nyata.

3. Efektivitas Pendampingan dan Respons Sosial

Pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh mahasiswa KKN melalui kunjungan rumah, wawancara keluarga, dan edukasi komunitas berhasil membangun kedekatan sosial dan kepercayaan antara penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lokal. Banyak keluarga yang sebelumnya belum terdapat merasa diakui keberadaannya dan terbantu dalam memahami hak-hak dasar serta peluang ekonomi yang bisa diakses. Respons positif dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan LSM seperti PPDI mendukung keberlanjutan program ini sebagai langkah awal dalam perumusan kebijakan inklusif berbasis data dan kebutuhan riil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendataan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Kaliwungu memberikan kontribusi nyata dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal. Sebanyak 205 individu berhasil didata melalui pendekatan sensus lapangan, mengungkap sebaran jenis disabilitas yang dominan pada kategori fisik, mental, sensorik, dan intelektual. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas belum memiliki akses memadai terhadap pekerjaan, layanan sosial, pendidikan, dan dokumen administratif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam program bantuan ekonomi.

Pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh tim KKN UIN Salatiga melalui pelatihan teknis, kunjungan rumah, wawancara keluarga, dan fasilitasi komunikasi lintas sektor membuka ruang dialog antara masyarakat, penyandang disabilitas, perangkat desa, dan LSM. Hal ini menghasilkan respons positif dari komunitas dan menunjukkan tingginya potensi keterlibatan lokal dalam merancang program pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya data terstruktur, pendampingan yang berkelanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan kelompok rentan. Model pelaksanaan kegiatan ini dapat dijadikan contoh praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain, dengan adaptasi sesuai karakteristik geografis dan sosial masing-masing. Penelitian ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem ekonomi lokal yang inklusif, memberdayakan, dan berorientasi pada kemandirian penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Survei Penduduk Disabilitas Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Dewi, S. (2015). *Faktor kepercayaan diri pada penyandang disabilitas dalam mengakses dunia kerja*. Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD).



- Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan: Kajian literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), Article 10.
<https://doi.org/10.7454/jpm.v3il.1027>
- Mulyadi, B. (2020). Penyesuaian diri penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial. Focus: *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- Purinami, G., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Focus: *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244
- Putra, Ahmad & Rahmawati, Dewi. 2020. Peran LSM dalam Pemberdayaan Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1): 12–28.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, T. (2015). Informasi sebagai faktor penghambat pemberdayaan disabilitas di daerah pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.